

**TESIS**  
**ANALISIS KINERJA**  
**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**  
**DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



OLEH:

**ABDUL HAKIM**  
**P0800216013**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**2020**



**TESIS**

**ANALISIS KINERJA  
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Disusun dan diajukan oleh

**ABDUL HAKIM**

Nomor Pokok : P0800216013

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal **24 Agustus 2020**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat

**Dr. Badu Akhmad, M.Si.**  
Ketua

**Dr. Ali Fauzy Ely, M.Si.**  
Anggota

Ketua Program Studi  
Administrasi Pembangunan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

**Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si.**

**Prof. Dr. H. Armin, M.Si.**



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Hakim

Nomor Pokok Mahasiswa : P0800216013

Program Studi : Administrasi Pembangunan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Agustus 2010

Yang menyatakan,

  
Abdul Hakim



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Pemurah, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan karya ilmiah yang berjudul Analisis Kinerja Program Pemberdayaan Melalui Pendampingan Dalam Pembangunan Desa Di kabupaten Polewali Mandar dapat terselesaikan. Salam dan Taslim kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang atas syafaatnya hingga penulis dapat memperoleh iradah Allah untuk dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini.

Karya ilmiah ini merupakan syarat yang harus penulis penuhi dalam rangka penyelesaian tingkat magister pada Program Studi Administrasi Pembangunan di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.

Sekiranya dalam karya ilmiah ini terdapat banyak kekurangan, penulis memohon perkenan maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak yang berkesempatan membacanya. Oleh karena keterbatasan penulis sehingga tidak dapat memenuhi ekspektasi atas motivasi penyusunan karya ilmiah ini. Dan kepada semua pihak yang turut serta membantu serta memberi dukungan dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:



1. Bapak, Dr. Badu Akhmad, M.Si. selaku pembimbing I. terima kasih atas arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama dalam proses penyusunan karya Ilmiah ini.
2. Bapak, Dr. Ali Fauzy Ely, M.Si. selaku Pembimbing II. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya selama dalam dalam penyusunan Karya Ilmiah ini.
3. Ibu, Prof. Dr. Dwi Aries Tina Palubuhu, MA., Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dan staff.
4. Bapak, Prof. Dr. H. Armin, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta seluruh jajaran dan staff.
5. Bapak, Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si., Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan beserta staff.
6. Seluruh Dosen Pengajar pada Program Studi Administrasi Pembangunan, terima kasih atas segala dukungannya
7. Seluruh staff Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya kepada staff bidang akademik Program Studi Administras Pembangunan. Terima kasih atas perkenan bantuannya kepada penulis, yang selama masa pandemik senantiasa membebani dengan berbagai hal berkenaan dalam penyelesaian proses penyusunan karya ilmiah ini
8. Terima kasih yang tak terhingga juga aku persembahkan kepada istriku, Nurliah beserta anakku matahariku, Bunga



Fatimah Rialangiq atas kesabaran dan doa-doanya yang senantiasa mengiringi langkahku dalam menempuh studi.

---

Akhirnya, semoga karya ilmiah ini dapat menjadi manfaat dengan segala keterbatasan-keterbatasan yang tertulis di dalamnya

Wassalam.

*“bahwa perubahan selalu tak semudah  
loncatan-loncatan berpikir,  
dan peduli tak pernah memilih tujuan”*

---

Makassar, 27 Agustus 2020

Penulis,

---

---

Abdul Hakim



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian .....	14
1.4. Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Kinerja.....	15
2.2. Program Pemberdayaan Masyarakat .....	22
2.3. Desa .....	25
2.4. Hasil Penelitian Sebelumnya .....	32
2.5. Kerangka Pikir.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
.....ain dan Strategi Penelitian.....	37
.....asi Penelitian.....	37



3.3. Fokus Penelitian .....	38
3.4. Informan Penelitian .....	41
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.7. Teknik Analisis Data .....	42

## **BAB IV DESKRIPSI DAERAH DAN LATAR PENELITIAN**

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Polewali Mandar .....	45
4.1.1. Geografis .....	45
4.1.2. Demografis.....	48
4.2. Geografi dan Demografis Desa Pussui .....	51
4.3. Geografi dan Demografis Desa Puccadi .....	53
4.4. Geografi dan Demografis Desa Panyampa .....	54

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1. Program Pemberdayaan .....	56
5.1.1. Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	59
5.2. Pemberdayaan Aparatur Desa.....	73
5.3. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) .....	85
5.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Terhadap Kinerja Program Pemberdayaan .....	93
5.2.1. Faktor Pendukung.....	93
5.2.2. Faktor Penghambat .....	95

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan .....	98
an-saran .....	99



DAFTAR PUSTAKA .....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	106



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.3. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3.1. Desa lokasi penarikan data berdasarkan kondisi geografis gunung dan pesisir .....	38
Tabel 3.2. Model Teknik Analisis Data Model Interaktif .....	44
Tabel 4.1. Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar dirinci menurut Kecamatan.....	46
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kabupaen Polewali Mandar dirinci menurut Kecamatan.....	48
Tabel 4.3. Penduduk Agama dirinci menurut Kecamatan .....	49
Tabel 4.4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Pussui .....	63
Tabel 4.5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Puccadi .....	64
Tabel 4.6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Puccadi .....	66
Tabel 4.7. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Panyampa .....	67
Tabel 4.8. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Panyampa .....	68
Tabel 4.9. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Panyampa .....	68
Tabel 4.10. Program Pemberdayaan Aparatur Desa Puccadi .....	75
Table 4.11. Program Pemberdayaan Aparatur Desa Puccadi .....	76
Table 4.12. Program Pemberdayaan Aparatur Desa Panyampa .....	77
Table 4.13. Program Pemberdayaan Aparatur Desa Panyampa .....	77
Table 4.14. Program Pemberdayaan BUMDesa Desa PUssui .....	86



## ABSTRAK

ABDUL HAKIM. *Analisis Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Polewali Mandar* (Dibimbing oleh Badu Akhmad dan Ali Fauzy Ely).

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan kinerja program pemberdayaan masyarakat desa, serta faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap kinerja program pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa.

Penelitian ini juga bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumen. Sumber data ditarik desa dengan klasifikasi desa gunung, desa dataran dan desa pesisir di Kabupaten Polewali Mandar. Teknik analisis data menggunakan tiga cara yaitu: (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, (3) Penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat desa belum berjalan maksimal. Secara umum, Program pemberdayaan yang dilaksanakan meliputi beberapa bidang yaitu bidang pemberdayaan aparatur desa, bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa. Program pemberdayaan masyarakat desa diharapkan akan menjadi pilar utama penguatan desa. Akan tetapi pada kenyataannya, Program pemberdayaan masyarakat desa juga tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa. Program pemberdayaan masyarakat desa menemui kendala terkait dengan sumberdaya manusia pada aparatur penyelenggara desa, pengurus badan usaha milik desa dan masyarakat itu sendiri. Disamping lemahnya kemampuan pemerintah desa dan lembaga-lembaga dalam lingkup pemerintah desa, serta masyarakat dalam memahami tujuan program pemberdayaan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Bahkan, pemahaman dan interpretasi terhadap kata "pemberdayaan" masih sangat minim dan begitu sulit untuk membangun keselarasan antar stake holder dalam membangun pemahaman terhadap kata pemberdayaan. sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

kata kunci: pemberdayaan, pembangunan desa



## ABSTRACT

Abdul Hakim. Performance Analysis of Empowerment Programs in Polewali Mandar Regency (supervised by Badu Akhmad and Ali Fauzy Ely)

This study aims to analyzes and describes the performance of empowerment programs, as well as supporting factors and inhibiting factor for the performance of empowerment programs in village development.

This study also intends to understand all phenomena which are experienced by research subject holistically. Researcher used data-collecting technique by observing, interviewing, and collecting document. The data were collected from three classified villages those are from mountain village, mainland village, and coastal village in Polewali Mandar Regency. The researcher also used three ways of data-analizes technique, those are: (1) Data reduction, (2) Presentation of the data, and (3) Taking conclusions.

The results of the study shows that the empowerment program has run optimally. The empowerment program carried out includes several section, namely the section of empowering village officials, the section of community empowerment, and the empowerment of Village-Owned Enterprises which is expected to be the main pillar of village strengthening. Besides the weak capacity of the village government and institutions within the scope of village government, as well as the community in understanding the objectives of the empowerment program as mandated by law. In fact, the understanding and interpretation of the word "empowerment" is still very minimal and it is so difficult to build harmony between stakeholders in building an understanding of the word empowerment as mandated by law

**Key Words:** empowerment, village development





Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi. Amstron dan Baron dalam Wibowo (1998:15). Sedangkan Indra Bastian (2001:329), menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program serta kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi Kinerja merupakan catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Sedangkan untuk dapat membaca hasil atau capaian, termasuk manfaat serta pengaruh sebuah kegiatan atau program maka pengukuran kinerja atas kegiatan yang dimaksud menjadi suatu kewajiban.

Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan sarana untuk menilai tingkat keberhasilan sebuah kegiatan. Karena dengan pengukuran kinerja maka diharapkan akan memudahkan semua pihak memberikan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini juga akan menjadi usaha untuk mengeliminir

persepsi yang muncul dan beragam di masyarakat mengenai  
...an sebuah kegiatan atau program.



Menurut Mahsun (2009), Indikator Kinerja meliputi:

1. Indikator Input (masukan) adalah segala sesuatu yang terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai keluaran atau hasil, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang capable berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, disamping ketersediaan anggaran atau biaya yang akan dipergunakan sebagai penunjang agar tujuan dan sasaran kegiatan dapat tercapai dan memperoleh manfaat;
2. Indikator Process (Proses), ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan, seperti motifasi yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan sebuah kegiatan, serta metode yang digunakan;
3. Indikator Output (Keluaran), sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan, seperti pemahaman masyarakat atau komunitas terhadap motifasi serta tujuan sehingga kegiatan tersebut dijalankan;
4. Indikator Outcome (Hasil), sesuatu yang mencerminkan berfungsinya hasil kegiatan dan memberi efek atau pengaruh dalam pelaksanaan sebuah kegiatan;
5. indikator Benefit (Manfaat), sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan sebuah kegiatan atau program; dan

Indikator Impact (Pengaruh atau Dampak), pengaruh yang timbulkan sebuah kegiatan telah selesai dilaksanakan.



Keseluruhan indikator diatas dapat digunakan dalam menganalisis setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk program pemberdayaan masyarakat desa sebagai salah satu poin penting dalam usaha penguatan otonomi daerah.

Penguatan otonomi daerah sebagaimana dicanangkan dalam konsep Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tetap menuai kritikan dalam usaha pemerataan pembangunan, sebab pada tataran praktiknya pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan yang bersifat otonom ternyata tidak mampu menciptakan pemerataan sebagaimana otonomi daerah cita-citakan. Dan seiring dengan itu, berbagai argumen alternatif guna memecahkan permasalahan yang hadir di tingkat pemerintahan lokal mulai bermunculan, diawali dengan usaha revisi atas undang-undang otonomi daerah hingga lahirnya diskursus penguatan desa sebagai sebuah solusi.

Diskursus penguatan desa kemudian mengemuka mengiringi pelaksanaan otonomi daerah yang selanjutnya bermuara dengan kelahiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kelahiran Undang-undang desa ini lantas menjadi spirit baru penguatan lokal yang semula hampir meredup karena kegamangan dan keraguan sejumlah kalangan terhadap capaian undang-undang otonomi daerah.

Sejalan dengan itu, AAGN Ari Dwipayana dkk. dalam Pembaharuan

003: 2) mengungkapkan bahwa secara historis Desa merupakan bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di



Indonesia. Jauh sebelum negara-bangsa modern terbentuk, entitas sosial sejenis desa telah eksis sebagai institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Desa merupakan institusi otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri, dan mengakar kuat, serta relatif mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan dari luar.

Lebih lanjut diungkapkan bahwa pembaharuan desa harus dilakukan secara hati-hati dalam mengusulkan arah dan format penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan mengingat pada dua hal. *Pertama*, tingkat keberagaman desa sangatlah tinggi. Penyeragaman arah perlu senantiasa diwaspadai; *Kedua*, desa merupakan wujud 'bangsa' yang paling kongkret. Di level desa itulah identitas kolektif masyarakat dibentuk, dan memformat ulang tata pemerintahan pada dasarnya mempertaruhkan spirit kebangsaan. Namun, diatas bangunan sosial desa telah berdiri suatu perangkat kehidupan modern yang disebut "*nation-state*". Nasib desa sesungguhnya tidak luput dari *Intervensi Negara* yang kemudian diarahkan pada keberpihakan terhadap usaha penguatan Desa guna mewujudkan pemerintahan yang adil dan mensejahterakan. Dari sinilah, kemudian menjadi dasar kelahiran Undang-undang Desa..

Kelahiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentu tidak saja berangkat dari diskursus sosiologis, tetapi didasarkan pada realitas. Menurut data dari Kementerian Negara Pembangunan

Tertinggal (KPDT) tahun 2016, terdapat 38.232 (54,14%) kategori aju, yang terdiri dari dua sub kategori yaitu 36.793 (52,03%)



subkategori maju dan 1.493 (2,11%) subkategori sangat maju. Sementara itu, Desa tertinggal berjumlah 32.379 (45,86%) yang terdiri dari 29.634 (41,97%) subkategori tertinggal dan 2.745 (3,89%) subkategori sangat tertinggal. Fakta tentang Desa tertinggal menyebutkan bahwa Desa yang belum dapat dilalui mobil sebanyak 9.425, Desa yang belum memiliki sarana kesehatan sejumlah 20.435, Desa yang belum memiliki pasar permanen sebanyak 29.421 Desa dan Desa yang belum memiliki listrik sebagai alat penerangan sebanyak 6.240 Desa (Edy: 2008).

Mewujudkan desa yang kuat sebagaimana mandat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka pemerintah mengucurkan dana desa dari Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber pendapatan, sekaligus menjadi pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. dalam Buku Pintar Desa (2017: 11). Dijelaskan pula bahwa kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan serta mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa, dimana diakui bahwa terdapat anggaran kementerian atau lembaga yang berbasis desa mencapai 0,28% pada tahun 2017.

Sebagai bahan pertimbangan, penulis mencoba mengemukakan keberhasilan pengelolaan dana desa di Desa Ponggok Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Bahkan keberhasilan tersebut mendapat

dukungan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, disebutkan bahwa Kepala Desa Ponggok, Junaedhi Mulyono



mengatakan bahwa alokasi dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah, salah satunya digunakan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan mampu mendongkrak pendapatan masyarakat desanya. Selanjutnya, dikatakan bahwa pembangunan BUMDesa membukukan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) pada Tahun 2016. Dijelaskan bahwa, keuntungan yang diperoleh mencapai angka Rp. 10,3 M, dan angka Rp 3 M sebelumnya adalah hak Desanya karena Desa Ponggok telah melakukan MoU dengan Bulog untuk membentuk Holding<sup>1</sup>.

Junaedhi juga mengemukakan bahwa selain untuk pengembangan BUMDes, alokasi dana Desa juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, seperti penyediaan sanitasi dan air bersih bagi masyarakat<sup>2</sup>, serta seluruh mandat yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah kewenangan, dan menjadi tugas desa yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, BAB IV Kewenangan Desa, Pasal 22 yang selanjutnya diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Bab II Pasal 3 yang mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa.



[www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/3068600](http://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/3068600) diakses tanggal 6 September  
<http://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/3068600> Diakses Tanggal 6  
2018

Secara Substansial, upaya pemerintah dalam melakukan penguatan desa adalah upaya untuk menunjang penataan desa melalui pemberdayaan masyarakat desa. Urgensi dari fungsi pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Hal ini selanjutnya akan menjadi embrio lahirnya fungsi control masyarakat dalam pembangunan.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan kepercayaan, Patuh Aturan, dan Jaringan. Dengan modal sosial yang kuat maka akan mudah mengarahkan dan mengatur (*direct*) masyarakat, demikian pula upaya transfer pengetahuan, segalanya menjadi mudah. Termasuk penguatan pengetahuan, modal (*money*), dan masyarakat itu sendiri. Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah Transfer kekuasaan melalui penguatan modal social kelompok untuk menjadikan kelompok produktif dapat mencapai kesejahteraan social. Modal sosial yang kuat akan menjamin *sustainable* didalam membangun kepercayaan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal sosial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan

uan individu untuk melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari n dan minat mereka.



Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial (Sipahelut, 2010). Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto 2005).

Jimmu, (2008) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat tidak hanya sebatas teori tentang bagaimana mengembangkan daerah pedesaan tetapi memiliki arti yang kemungkinan perkembangan di tingkat masyarakat. Pembangunan masyarakat seharusnya mencerminkan tindakan masyarakat dan kesadaran atas identitas diri. Oleh karena itu, komitmen untuk pengembangan masyarakat harus mengenali keterkaitan antara individu dan masyarakat dimana mereka berada. Masyarakat adalah sebuah fenomena struktural dan bahwa sifat struktural dari kelompok atau masyarakat memiliki efek pada cara orang bertindak,

dan berpikir. Tapi ketika kita melihat struktur tersebut, mereka tak seperti kualitas fisik dari dunia luar. Mereka bergantung pada



keteraturan reproduksi sosial, masyarakat yang hanya memiliki efek pada orang-orang sejauh struktur diproduksi dan direproduksi dalam apa yang orang lakukan. Oleh karena itu pengembangan masyarakat memiliki epistemologis logis dan yang dasar dalam kewajiban sosial yang individu memiliki terhadap masyarakat yang mengembangkan bakat mereka.

Menurut Wilson (1996) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat. *Tahap pertama* yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pada *tahap kedua*, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau factor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada *tahap ketiga*, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. *Tahap keempat* yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada *tahap kelima* ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada *tahap keenam* telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Pada *tahap*

masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil



yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi.

Apabila kita cermati dari serangkaian literature tentang konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat maka konsep pemberdayaan adalah suatu proses yang diupayakan untuk melakukan perubahan. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan/daya kepada kumpulan masyarakat yang berada pada kondisi ketidakberdayaan agar menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis.

Dari modul Kuliah Kerja Nyata Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditulis oleh Arief Perbantara dan Mujiyanto, terbitan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjelaskan bahwa pemberdayaan dipahami sebagai sebuah proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan.

Selanjutnya dijelaskan, bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan

mpanye aksi. Atau dengan kata lain disebut sebagai usaha untuk un dan membentuk kekuatan dalam komunitas.



Menjadi ironi kemudian, karena mayoritas pemerintah desa khususnya di Kabupaten Polewali Mandar cenderung masih kurang memperhatikan mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat desa itu dilakukan. Kemudian, menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana program pemberdayaan masyarakat desa itu dilakukan serta bagaimana pencapaian yang diperoleh dalam pelaksanaannya. Pertanyaan tersebut menjadi semakin menjadi konkrit manakala peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar serta seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Polewali Mandar.

Olehnya itu, meskipun terdapat upaya terstruktur dan terukur sebagaimana diatur dalam undang-undang, optimalisasi pelaksanaan program pemberdayaan harus terus dan didorong. Dan untuk itu, maka sejalan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, kegiatan pengukuran kinerja juga harus dilakukan.

Demianlah, bahwa kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat desa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kegiatan yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengaruh terhadap upaya penguatan desa. namun, sebagaimana disebutkan dimuka bahwa menurut pengamatan peneliti, pemerintah kabupaten Polewali Mandar serta pemerintah desa di Kabupaten Polewali Mandar dinilai belum

usaha maksimal, bahkan cenderung melakukan kegiatan tanpa  
naan yang maksimum. Meskipun pelaksanaan kegiatan yang



dimaksud dapat memberikan hasil yang diharapkan dalam hal berjalannya transfer pengetahuan ke masyarakat. Tetapi lebih dari apa yang diperoleh utamanya dalam hal manfaat serta pengaruh yang berkelanjutan, masih menimbulkan persepsi yang beragam di beberapa kalangan.

Dengan demikian, maka Pengukuran kinerja akan menjawab pertanyaan yang bersumber dari pengamatan peneliti mengenai kecenderungan pemerintah program dalam memberikan perhatian serius terhadap upaya penguatan desa melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Kondisi-kondisi tersebut, mendorong minat peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisis **“Analisis Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Polewali Mandar.”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam pembangunan desa adalah perihal yang sudah mengakar jauh sebelum lahirnya undang-undang desa dan rencana pengucuran dana desa. Masalah ini pada umumnya muncul karena proses yang terlaksana tidak melalui tahapan dan mekanisme secara modern. Proses perencanaan dan keseluruhan tahapan kerap kali “dikuasai” oleh Kepala Desa dan tidak jarang proses pelibatan masyarakat didalamnya cenderung sangat minimum dan bersifat normatif. Kondisi ini merupakan “kekeliruan” jika mengingat bahwa saat ini pemerintahan desa

berdiri di atas fondasi demokrasi yang merupakan corak Negara tetapi masih memiliki sifat feodal dalam penyelenggaraannya..



Dalam melihat masalah diatas penulis baranggapan bahwa pada dasarnya terdapat kesalahan dalam proses pembangunan desa disebabkan tidak adanya kontrol sosial yang muncul dari masyarakat secara maksimum, sementara pemerintahan yang demokratis bersumber dari kemampuan masyarakat untuk terlibat langsung dalam setiap tahapan pembangunan. Penulis mengasumsikan bahwa kontrol sosial hanya akan terbentuk apabila prinsip akuntabilitas dari pemerintah desa terpenuhi, sementara akuntabilitas itu sendiri dapat terlaksana secara maksimum jika terjadi transparansi dalam pelaksanaan yang menjadi konsekuensi langsung dari peningkatan partisipasi masyarakat yang massif. Disinilah peran penting program pemberdayaan masyarakat desa dalam mengupayakan partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Upaya ini setidaknya dapat menjadi opsi bagi wacana pembuatan poin spesifik mengenai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Berdasar pada uraian pada pendahuluan di bagian awal dan rumusan masalah yang disusun dalam bagian ini, maka penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan penelitian dengan batasan, sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja program pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Polewali Mandar?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat terhadap

kinerja program pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Polewali Mandar?



### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan diselenggarakan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kinerja program pemberdayaan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat terhadap kinerja program pemberdayaan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Polewali Mandar.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian yang dilaksanakan ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis:

#### **1. Manfaat Akademis**

Dengan memahami kinerja program pemberdayaan dalam pembangunan Desa maka penelitian ini dapat memperkaya khasanah bidang keilmuan Administrasi Publik khususnya terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat desa.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini menawarkan sebuah alternatif solusi yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk menangani berbagai persoalan atas kinerja program pemberdayaan masyarakat desa.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kinerja

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan sebagai penampilan, unjuk kerja atau prestasi. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik yang bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode. (Fahmi : 2010 :2).

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi. Amstron dan Baron dalam Wibowo (1998:15). Sedangkan Indra Bastian (2001:329), menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program serta kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi Kinerja merupakan catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsifungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.

Bernardin & Russel (1993: 379) mengemukakan bahwa hasil dari kerja yang telah dicapai oleh seorang karyawan sesuai dengan tugasnya pada periode tertentu. Dan sejalan dengan Amstrong



(1995: 13) yang melihat esensi kinerja merupakan suatu proses bersama antara manajer, individu dan tim yang dimana prosesnya didasarkan pada prinsip manajemen, juga pada kesepakatan terhadap persyaratan sasaran, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi serta rencana kerja dan penempatan. Disini, baik pendapat Bernadin, Russel, maupun Amstrong lebih mengacu pada terminology kinerja pegawai atau karyawan yang merupakan bagian dari tujuan yang hendak dicapai.

Sedangkan pengertian menurut Whitmore dalam Hamzah dan Lamatenggo, mengemukakan bahwa kinerja merupakan pengertian yang menuntut kebutuhan paling minim untuk berhasil. Oleh karena itu Whitmore mengemukakan pengertian kinerja yang dianggapnya representatif, maka tergambaranya tanggung jawab yang besar dari pekerjaan seseorang, selain itu kinerja dijelaskan sebagai aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepadanya (2012:59). Sementara itu, menurut Pasolong yang dikutip oleh Fahmi (2010: 5) bahwa kinerja mempunyai beberapa elemen yaitu :

- a. Hasil kerja yang dicapai secara individual atau secara institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri sendiri atau kelompok
- b. Dalam melaksanakan tugas, lembaga diberikan wewenang dan tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan

kuasaan untuk ditindak lanjuti sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik



- c. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan
- d. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral dan etika, artinya selain mengikuti aturan yang ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai moral dan etika yang berlaku

Sejalan pula dengan Rue dan Byar (1993), kinerja didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil "*the degree of accomplishment*" atau merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan. Selain itu, terdapat pula makna produktifitas dan efektifitas kerja. Pada konteks ini, kinerja diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi.

Sedangkan Mauren, Heaphy dan Gruska dikutip oleh Keban (1995: 15) mengemukakan bahwa dalam konsep kinerja yang berkembang dewasa ini dikenal dengan terminology keunggulan kerja (performance excellence). Terminology yang merujuk pada pendekatan terintegrasi pada pengelolaan kinerja organisasi dimana diharapkan akan menghasilkan penyampaian nilai yang terus meningkat bagi pengguna yang akan berkontribusi bagi suksesnya organisasi, perbaikan efektifitas dan kapabilitas organisasi secara menyeluruh, dan pembelajaran organisasi serta individu. Konsep kinerja terkini menyediakan kerangka

in alat pengkajian untuk memahami kekuatan dan kesempatan



organisasi guna mewujudkan perbaikan, yang pada akhirnya akan memandu usaha perencanaan.

Dengan demikian, kinerja merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat bermanfaat untuk menilai seberapa jauh pelayanan itu telah diberikan. Konsep kinerja merupakan gambaran hasil yang dicapai dalam pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sararan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis (Mahsun, 2006: 25).

Menurut Mahsun, Indikator Kinerja meliputi:

1. Indikator Input (masukan) adalah segala sesuatu yang terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai keluaran atau hasil, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang capable berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, disamping ketersediaan anggaran atau biaya yang akan dipergunakan sebagai penunjang agar tujuan dan sasaran kegiatan dapat tercapai dan memperoleh manfaat bagi kehidupan masyarakat;
2. Indikator Process (Proses), ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan, seperti motifasi yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, serta metode yang digunakan;



3. Indikator Output (Keluaran), sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan, seperti pemahaman masyarakat atau komunitas terhadap motivasi serta tujuan sehingga kegiatan pemberdayaan dijalankan;
4. Indikator Outcome (Hasil), sesuatu yang mencerminkan berfungsinya hasil kegiatan dan memberi efek terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan desa;
5. indikator Benefit (Manfaat), sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan oleh pemerintah desa; dan
6. Indikator Impact (Pengaruh atau Dampak), pengaruh yang ditimbulkan, seperti kecakapan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Lebih jauh, kinerja dimaknai sebagai hasil kerja pada satu kesatuan waktu atau ukuran tertentu (Moenir, dikutip oleh Susilo & Nugroho, 2010: 45). Pengertian lainnya, Lembaga Administrasi Negara (LAN RI, 2000: 43) mengemukakan dalam Pedoman Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan.

Dengan mengacu kepada berbagai pendapat atau pengertian pokok kinerja diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya atau prestasi kerja adalah hasil yang diperoleh menurut ukuran



yang berlaku untuk suatu tugas atau pekerjaan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu.

Sedangkan pengukuran kinerja lebih difokuskan pada pengukuran efisiensi yang terkait dengan inputs, outputs, dan outcomes. Rogers (1994: 24) menjelaskan bahwa inputs pada pemahaman ini dianggap sebagai sumber yang dipakai untuk memproduksi pelayanan. Dalam hal ini manusia, uang, fasilitas atau sumber-sumber material lainnya diarahkan untuk meningkatkan pelayanan. Outputs merujuk pada pelayanan yang dihasilkan baik menyangkut mutu maupun jumlah. Sedangkan outcomes adalah hasil pemberian pelayanan atau keuntungan yang diperoleh pengguna layanan.

Konsep Indikator kinerja tersebut diatas kemudian dikembangkan lebih jauh. Harry (1999) mengemukakan bahwa Indikator kinerja tidak saja diamati dari aspek inputs, outputs, dan outcomes, tetapi juga sampai pada benefits dan impact dari kegiatan organisasi publik.

Witthaker (1999: 134) merupakan satu diantara ahli yang mendukung kelima hal yang menjadi Indikator pengukuran kinerja tersebut. Lebih lanjut disebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban. Pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran. Dan

kunci dari system pengukuran kinerja terdiri dari perencanaan dan



penetapan tujuan, pengembangan ukuran yang relevan, pelaporan formal dan hasil serta penggunaan informasi.

Selanjutnya, Witthaker juga menambahkan metode dalam pengukuran kinerja yang meliputi tahapan, yaitu: a) Menetapkan sasaran atau tujuan dan hasil yang diinginkan (perencanaan strategis); b) Menentukan Indikator kinerja dan selanjutnya mengukur kinerja; serta c) Mengevaluasi kinerja dan memanfaatkan hasil evaluasi untuk memperbaiki kinerja.

Tahapan tersebut diatas merujuk pada hasil keluaran dan hasil yang diperoleh dari proses, produk dan layanan yang memungkinkan evaluasi dan perbandingan relative terhadap goal, struktur, hasil sebelumnya dan organisasi lain. Kinerja dapat dipresentasikan dalam istilah uang dan non-uang. Dengan demikian pengukuran kinerja merupakan satu diantara metode pemerintah untuk menentukan metode penyediaan layanan yang berkualitas.

## **2.2. Program Pemberdayaan Masyarakat**

Edi Suharto (2017) mengemukakan bahwa apabila pembangunan nasional disederhanakan, maka ia dapat dirumuskan dalam tiga tugas utama yang mesti dilakukan oleh Negara-bangsa (nation-state) yakni pertumbuhan ekonomi (economic growth), perawatan masyarakat (community care) dan pengembangan manusia (humanity development).

pertumbuhan ekonomi mengacu pada bagaimana melakukan  
"ha" guna memperoleh financial yang diperlukan untuk membiayai



kegiatan pembangunan. Fungsi perawatan masyarakat menunjuk pada bagaimana merawat dan melindungi warga Negara dari berbagai macam resiko yang mengancam kehidupannya. Sedangkan fungsi pembangunan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menjamin tersedianya angkatan kerja berkualitas yang mendukung mesin pembangunan.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dan Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan desa juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Pasal 3).

Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata 'power' yang berarti kekuasaan atau atau keberdayaan. Olehnya itu, ide utama

dayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan, yang seringkali dengan kemampuan seseorang untuk membuat orang lain



mampu melakukan sesuatu yang terlepas dari keinginan atau minat yang dimilikinya (Edi Suharto: 57: 2017).

Pemberdayaan juga digunakan sebagai konsep alternative untuk meningkatkan kemampuan dan martabat masyarakat agar terlepas dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan, atau diistilahkan lain, berarti memandirikan atau memampukan masyarakat (Ginjar Kartasmita: 1996).

Secara umum, pemberdayaan dapat dipahami dengan beberapa cara pandang menurut Pusat Penelitian Pengembangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pertama, bahwa pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat, menjadi subyek yang berbuat secara mandiri sebagai partisipan dalam ruang dan kapasitas pengembangan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah, dan ikut menentukan proses politik diranah Negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Kedua, titik pijak pemberdayaan adalah kekuasaan (power), sebagai jawaban atas ketidak berdayaan masyarakat. ilmu social tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan control. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi antar manusia, tercipta dalam relasi social. Dengan pemahaman demikian,

dayaan sebagai sebuah proses perubahan yang memiliki konsep bermakna bahwa kekuasaan dapat berubah dan dapat pula



diperluas, dengan penekanan bahwa kekuasaan tidak statis melainkan dinamis (Edi Suharto: 2005).

Ketiga, pemberdayaan terbentang dari proses hingga visi ideal. Masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau gerakan secara kolektif mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar dan meraih kedaulatan. Gerakan ini dilakukan hingga mencapai suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai kemampuan bersuara, akses dan control terhadap lingkungan, komunitas, sumberdaya dan relasi social politik dengan Negara.

Keempat, pemberdayaan juga terbentang dari level psikologis-personal (anggota masyarakat) hingga ke level structural masyarakat secara kolektif. Sasaran pemberdayaan adalah masyarakat, yang didalamnya mewadahi warga secara personal maupun komunitas secara kolektif. Pemberdayaan adalah upaya membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat yang bertumpu pada komunitas local melalui pendekatan partisipatif dan belajar bersama.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menempatkan kesepakatan bersama seluruh warga desa sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus dan mengatur desa. sebagaimana demokrasi member ruang bagi anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingannya. Dan

silannya dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut  
uan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan



secara politis. Olehnya itu maka program pemberdayaan masyarakat desa menjadi sesuatu yang sangat urgen bagi terlaksananya pembangunan secara menyeluruh.

### 2.3. Desa

Zid dan Alkhudri (2016), mengemukakan penemuan istilah “Desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh *Mr. Herman Warmer Muntinghe*. *Muntinghe* merupakan seorang Belanda, anggota *Raad Van Indie* pada masa penjajahan colonial Inggris (Pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia). Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “deca” yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dalam versi lain kata Desa berasal dari kata “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa dari perspektif geografis, Desa atau village diartikan sebagai “*a group of houses and shops in country area, smaller than a town (Colling, 2004: 257)*”. Istilah Desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan diluar Jawa misalnya di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa dengan Desa sangat beranekaragam, sesuai dengan asal mula terbentuknya area Desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genealogis, atau territorial, dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu



(semisal Desa petani atau Desa nelayan, atau Desa penambang emas) dan sebagainya, Cahyono (1999: 2006).

Selanjutnya *Koentjaraningrat, (1984)* memaknai Desa sebagai suatu komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat. Pemaknaan tentang Desa menurut pandangan ini menekankan pada cakupan, ukuran atau luasan dari sebuah komunitas, yaitu cakupan dan ukuran atau luasan yang kecil.

Pengertian lain tentang Desa dikemukakan oleh *Hayami dan Kikuchi (1987)* bahwa Desa sebagai unit dasar kehidupan kelompok terkecil di Asia. Dalam konteks ini “Desa” dimaknai sebagai suatu “Desa alamiah” atau “dukuh” tempat orang hidup dalam ikatan keluarga, dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial dan ekonomi.

Sedangkan *Sastramihardja (1999)* menyatakan bahwa Desa merupakan suatu sistem yang melakukan fungsi internal yaitu mengarah pada pengintegrasian setiap komponen yang ada didalamnya, sehingga keseluruhannya merupakan satu sistem yang bulat dan mantap. Di samping itu, fungsi eksternal dari sitem sosial antara lain proses-proses sosial dan tindakan-tindakan sistem tersebut akan menyesuaikan atau menanggulangi suatu situasi yang dihadapinya.

Desa juga memiliki tiga definisi untuk tujuan analisis yang berbeda-

aitu analisis statistic, analisis sosial psikologis, dan analisis yang dikemukakan oleh *Landis (1984)*, sedangkan untuk



memahami masyarakat Desa menurut *Roucek* dan *Warren (1962)* dapat dilihat dari karakteristiknya yaitu: 1) Besarnya peranan kelompok premier; 2) Faktor geografis sebagai dasar pembentukan kelompok; 3) Hubungan bersifat akrab dan langgeng; 4) Homogen; 5) Keluarga sebagai unit ekonomi; dan 6) Populasi anak dalam proporsi lebih besar.

Sementara itu, bila melihat Desa dalam konteks kategoristik, lebih jauh *Zid* dan *Alkhudri (2016: 5)*, menuliskan bahwa terdapat berbagai ragam tipe, seperti Desa Swadaya, Desa Swakarsa, dan Desa Swasembada. Apabila dilihat dari struktur sosial dikategorikan:

- a. Struktur sosial berdasarkan genealogis, misalnya: Batak dan Minangkabau.
- b. Struktur sosial dalam hubungan patron-klien, misalnya: Bone, Makassar, dan Kendari.
- c. Struktur sosial berdasarkan luas pemilikan tanah
- d. Struktur sosial yang kompleks

Sedangkan makna mendasar Desa dari segi bentuk dan pola pemukiman, dapat dilihat beberapa aspek, yaitu aspek budaya, aspek ketersediaan SDA serta aspek ketergantungan sesame. Di samping bahwa Desa menurut para ahli sosiologi, dicirikan dalam penduduk yang terdiri atas suku bangsa yang homogeny, hubungan yang bersifat tertutup dan genealogis, hubungan sosial ekonomi yang bersifat agraris, ekologi

nyai tetapi menyegarkan, arus datang dan pergi manusia yang



sangat jarang, dan potensial untuk pengolahan tanah, perikanan, perkebunan, hutan dan kerajinan (2016: 6).

*Smith dan Zopf (1970)* mengemukakan pendapat tentang pola pemukiman. Menurut keduanya, pola pemukiman berkaitan dengan hubungan-hubungan keruangan (spasial) antara pemukiman penduduk Desa yang satu dengan yang lain dan dengan lahan pertanian mereka. Sedang *Landis (1948)* menggambarkan empat tipe pola pemukiman yaitu pola pemukiman: 1) mengelompok murni; 2) mengelompok tidak murni; 3) menyebar teratur; dan, 4) menyebar tidak teratur. Menurut tipe pola pemukiman, mengelompok murni adalah yang paling dominan di dunia, sedangkan yang paling ideal adalah pola pemukiman tipe menyebar teratur. Di Indonesia, terutama di Jawa cenderung memperlihatkan pola pemukiman tipe mengelompok murni.

Komunitas Desa merupakan komunitas kecil yang relative masih bersahaja, memiliki ketergantungan terhadap tempat tinggal atau lingkungan baik sebagai petani, nelayan atau yang lainnya. Coraknya didasarkan pada sistem mata pencaharian, terlebih pada sistem pertaniannya. Zid dan Alkhudri menuliskan dalam *Aminuddin (1990)* mengemukakan tentang Sembilan corak sistem pertanian, yaitu: 1) bercocok tanam di ladang berpindah; 2) bercocok tanam tanpa irigasi menetap; 3) bercocok tanam menetap dan intensif dengan irigasi na dan tanaman pokok padi; 4) bercocok tanam menetap dan dengan irigasi sederhana tanpa padi; 5) bercocok tanam sekitar



lautan tengah; 6) pertanian buah-buahan; 7) pertanian komersial dengan mekanisasi berdasarkan tanaman gandum; 8) pertanian komersial dengan mekanisasi; dan 9) pertanian perkebunan dengan mekanisasi.

Selain komunitas Desa pertanian, terdapat pula komunitas nelayan dengan faktor penentu struktur Desanya adalah kepemilikan sarana menangkap ikan (perahu, jaring-jaring, harpun, dan lainnya). Secara umum terdapat dua strata pokok dalam struktur masyarakat Desa nelayan yaitu juragan dan buruh nelayan. Selain itu, terdapat pula strata komando kapal yang posisinya berada di tengah-tengah kedua strata tersebut. Dan kondisi komunitas Desa nelayan ini cenderung lebih miskin dibanding komunitas Desa pertanian.

Dilihat dari kompleksitas permasalahan yang ada di Desa, maka Desa sebagai struktur pemerintahan paling aras juga memiliki kewenangan sendiri dalam mengelolah dirinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Yuliansyah dan Rusmianto bahwa kewenangan Desa seperti yang dijelaskan pada Permendes No. 1 Tahun 2015 adalah kewenangan yang dimiliki Desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat Desa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Demikian juga dijelaskan dalam Undang-undang No. 6

014 tentang Desa (2017: 3).



Widjaja (2014) menjelaskan bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal asul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Solekhan (2014) mengemukakan bahwa pemerintahan Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama di tingkat elit politik. Penerapan UU No. 32/2004, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan Desa dengan pemerintah supraDesa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level Desa.

Dalam Pembaharuan Desa (2003), menyebutkan bahwa menggejalanya berbagai bentuk kebangkitan yang digerakkan oleh kekuatan dari Desa merupakan keniscayaan dalam pembaruan penyelenggaraan pemerintahan. Apapun pilihan format penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dikehendaki, dan kemanapun arah pembaruan hendak dipancarkan, keterlibatan orang-orang Desa merupakan keharusan. Dan orang-orang Desa tersebut tidak hanya stake-holders

atau pemegang saham perubahan. Preferensi yang an dalam menentukan format pemerintahan yang baik perlu



dihormati oleh pihak-pihak “luar” dari Desa: pejabat pemerintah (penyelenggara kekuasaan Negara), aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM.

Dan atas berbagai gejala kebangkitan oleh kekuatan dari Desa, secara mekanis Desa dituntut untuk membentuk kelembagaan mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa. Dengan demikian, kelembagaan Desa harus bekerja sinergis dan terpadu untuk mencapai Desa yang sejahtera. Dalam penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kelembagaan Desa/Desa adat, yaitu lembaga pemerintahan Desa/Desa adat yang terdiri atas pemerintah Desa/Desa adat, dan badan permusyawaratan Desa/Desa adat, lembaga kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat (Yuliansyah dan Rusmianto: 2017).

Pada akhirnya kesemua ini membawa implikasi pada kemungkinan munculnya variasi antar daerah dalam model-model pemerintahan di tingkat Desa. Dan implikasi ini merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terlebih dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tentang Kewenangan Desa.



## 2.4. Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.3

No.	Peneliti, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Pendekatan dan hasil penelitian	Perbandingan penelitian
1.	Tze San Ong, Boon Heng The, 2014, meneliti tentang: "An Empirical Examination of the Relationship between Organization's Learning Culture and Performance Measurement System in Malaysia"	Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam organisasi.  Sistem pengukuran kinerja (yaitu adopsi tindakan-tindakan non-keuangan dan frekuensi pelaporan).	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan beberapa hipotesis mengenai karakteristik sistem pengukuran kinerja yang mungkin cocok dalam kondisi tertentu. Temuan menunjukkan bahwa budaya belajar organisasi tampaknya menjadi variable penting, hasil uji secara statistic ditemukan korelasi dengan karakteristik system pengukuran kinerja.	Pengukuran kinerja pada penelitian terdahulu bersifat menguji system pengukuran kinerja organisasi dalam kaitan dengan budaya belajar. Sedangkan pada penelitian ini melihat kinerja fungsi dan peranpendamping Desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan Desa.
2.	Mercy Pricilla South, 2013, Judul Kajian: Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bitung	Pengelolaan Kekayaan Alam dalam rangka kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dengan menggunakan rasio efisiensi, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memungut pendapatan asli daerah masih terlalu besar. Kesimpulan penelitian, bahwa kinerja Dinas pendapatan Daerah selama lima tahun adalah baik	Penelitian ini merupakan pengembangan dan aplikasi dari rasio efisiensi. Penelitian sebelumnya yang berfokus pada kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah, sedangkan penelitian ini berfokus pada kinerja organisasi dalam pengelolaan pajak daerah



3.	Sri Nuryani, 2010. Judul Kajian: Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Instansi DPPKKD Kabupaten Aceh Selatan	Mengkaji peningkatan kinerja instansi DPPKKD	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian setelah dilakukan restrukturisasi belum maksimal yang ditunjukkan oleh kinerja anggaran mengalami penurunan pasca restrukturisasi, yakni dari daya serap 86,0% pada tahun 2008 menurun menjadi 77,75% pada tahun 2009.	Penelitian terdahulu cenderung lebih melihat kinerja organisasi setelah restrukturisasi organisasi dengan melihat daya serap penggunaan anggaran. Sedangkan pada penelitian ini, berfokus pada kinerja organisasi dalam pengelolaan pajak daerah.
4.	Mwita, 2008. Judul Kajian: Performance Manajemen Model: A System Based Approach to Publik Service Quality	Penelitian dilakukan di berbagai Negara berkembang, dengan mendefinisikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi berbagai kinerja organisasi	Di literature yang menyatakan bahwa manajemen sector publik di Negara-negara berkembang tertinggal dari Negara maju oleh sebab sangat tersentralisasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelayanan publik ni Negara-negara berkembang merupakan bagian ekonomi mereka. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa bagaimana mengintegrasikan model manajemen kinerja sebagai manajemen publik baru dengan peran system manajemen akuntansi dalam menemukan kebutuhan informasi.	Hasil penelitian terdahulu menyarankan agar mengadopsi model manajemen kinerja di Negara maju untuk memperbaiki kualitas pelayanan dalam organisasi sector publik di Negara berkembang, sedangkan penelitian ini merupakan pengadopsian dari penelitian terdahulu.
5.	Holzer dan Kloby, 2005. Judul Kajian: Publik Performance Measurement: An Assessment Of The State Of The and Models	Model pengukuran citizen driven sebagai strategi untuk mengukur berbagai hal yang menjadi masalah warga Negara	Pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literature, yang menilai praktek pengukuran kinerja sebagai alat manajemen. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan	Pengukuran kinerja pada penelitian terdahulu bersifat strategis dalam mengukur berbagai hal yang menjadi masalah warga Negara. Sedangkan



	For Citizen Participation.		<p>system pengukuran kinerja, membuktikan partisipasi warga Negara dalam proses dapat menambah hasil dari keseluruhan proses, memaksimalkan produktifitas, penetapan tujuan dan ukuran hasil, kapasitas internal, output dan outcome untuk menaksir efektifitas.</p> <p>Pengembangan model State of The Art dalam system pengukuran kinerja terbatas secara geografis/cultural</p>	<p>pada penelitian ini, adalah untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan efisiensi dan keefektifan</p>
--	----------------------------	--	--	---

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan pengembangan dari berbagai penelitian sebelumnya yang berfokus pada kinerja pendampinlam pembangunan desa di Kabupaten Polewali Mandar dapat ditingkatkan.

## 2.5. Kerangka Pikir

Program pemberdayaan masyarakat desa yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Pemerintah Desa di Kabupaten Polewali Mandar pada kurun waktu Tahun 2018 – 2019.

Dalam konteks ini, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja Program Pendampingan Masyarakat Desa

menganakan pendekatan kinerja pendamping Desa serta menganalisis



faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan program tersebut.

Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel yang ditarik dari teori kinerja sebagaimana Mahsun (2009), dengan menggunakan indikator pendekatan kinerja yang meliputi: 1. Indikator Masukan (*Input*), 2. Indikator Proses (*Process*), 3. Indikator keluaran (*Output*), 4. Indikator Hasil (*Outcome*), 5. Indikator Manfaat (*Benefit*), 6. Indikator Pengaruh atau Dampak (*Impact*) dengan maksud, sebagai berikut:

1. Indikator Input (masukan) adalah segala sesuatu yang terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai keluaran atau hasil, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang capable, disamping ketersediaan anggaran yang akan dipergunakan untuk menunjang tujuan dan sasaran kegiatan dapat tercapai dan memperoleh manfaat bagi kehidupan masyarakat;
2. Indikator Process (Proses), ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan, seperti motifasi yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan sebuah kegiatan pemberdayaan, serta metode yang digunakan;
3. Indikator Output (Keluaran), sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan, seperti pemahaman masyarakat terhadap motifasi serta tujuan kegiatan pemberdayaan dijalankan;



4. Indikator Outcome (Hasil), sesuatu yang mencerminkan berfungsinya hasil kegiatan dan memberi efek terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
5. indikator Benefit (Manfaat), sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan oleh pemerintah desa; dan
6. Indikator Impact (Pengaruh atau Dampak), pengaruh yang ditimbulkan, seperti kecakapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Keseluruhan variabel tersebut di atas, dianalisis dan disintesa kemudian dideskripsikan untuk mengetahui kinerja pendampingan dalam Pembangunan Desa.

### KERANGKA PIKIR

